

JUDUL : *LEGAL STANDING* ORANG ASING SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Nama : Michelle Juventia

Jurusan/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S. H., M. Hum. ; H. Heru Susanto S.H., M.Hum.

Abstrak

Kewenangan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi ialah sebuah mekanisme pemulihan hak konstitusional yang terlanggar akibat keberlakuan sebuah Undang-Undang. Hal demikian disebabkan pemohon wajib menguraikan secara jelas tentang hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya yang terlanggar. Namun sebagai salah satu perwujudan perlindungan hak asasi manusia, mekanisme pengujian Undang-Undang justru dinilai memiliki prasyarat yang diskriminatif berkaitan dengan kepemilikan legal standing. Hal ini disebabkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan legal standing bagi orang asing untuk dapat menjadi pemohon. Kepemilikan legal standing ialah hal yang esensial karena merupakan “dasar permohonan” dan dalam hal ini orang asing merupakan penduduk bersama dengan WNI. Kedudukan orang asing dan WNI sebagai penduduk membuat keduanya memiliki hak yang sama sebagaimana termaktub pada BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kewajiban yang sama, salah satunya ialah wajib tunduk terhadap hukum positif. Namun faktanya orang asing diberikan perlakuan hukum yang berbeda karena orang asing tidak memiliki hak untuk mempersoalkan manakala Undang-Undang tersebut pada nyatanya menyebabkan sebuah kerugian konstitusional. Hal inilah yang menjadi landasan untuk melakukan pengkajian mengenai pemberian legal standing bagi orang asing sebagai pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Warga Negara Asing, Mahkamah Konstitusi.

Title : *LEGAL STANDING* ORANG ASING SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Name : Michelle Juventia

Dicipline/ Study Programme : Hukum/ Ilmu Hukum

Contributor : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S. H., M. Hum. ; H. Heru Susanto S.H., M.Hum.

Abstract

The Authority of Judicial Review of the Law by the Constitutional Court is a mechanism for restoring constitutional rights that is violated due to the enforcement of a law. This is due to the fact that the applicant is obliged to clearly describe the violated constitutional rights and/ or authorities. However, as one manifestation of the protection of human rights, the mechanism for testing the law is considered to have discriminatory prerequisites relating to ownership of legal standing. This is due to the provisions of Article 51 paragraph (1) letter a of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court which does not provide a legal standing for foreigners to become applicants. Legal standing ownership is essential because it is the "basis for petition" and in this case foreigners are residents together with Indonesian citizens. The position of foreigners and citizens as citizens make both have the same rights as contained in Chapter XA of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and have the same obligations, one of which is the obligation to submit to positive law. But the fact is that foreigners are given different legal treatment because foreigners do not have the right to question when the Act in fact causes a constitutional impairment. This is the basis for conducting a study regarding the granting of legal standing for foreigners as petitioners in the case of judicial review of the Act in the Constitutional Court.

Keywords : Legal Standing, Foreign Citizens, Constittional Court.

